

# “SUDAH ADILKAH RUMAH KITA? MEWUJUDKAN EKONOMI PERAWATAN YANG INKLUSIF”

Amurwani Dwi Lestariningsih

Deputi Bidang Kesetaraan Gender  
Kementerian PPPA

Jakarta, 20 Agustus 2025



## Potensi Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

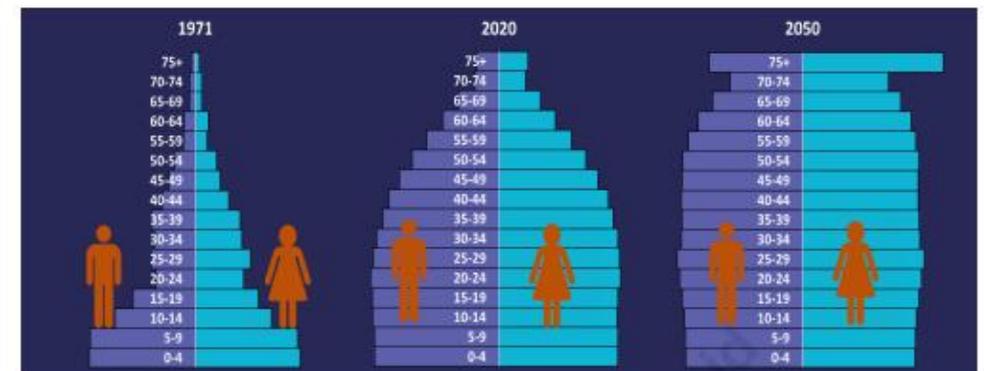
**Populasi perempuan** hampir setengah dari total populasi penduduk Indonesia, yaitu berjumlah **137.9 juta jiwa**.

- 49.88% penduduk Indonesia adalah perempuan dan 69.50% pada usia produktif
- Menurut ILO, total nilai kerja perawatan perempuan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dapat menyumbang 6.6% dari total 9% pendapatan domestik bruto (PDB) global
- World Bank mengakui peningkatan 25% partisipasi perempuan di tahun 2025 dapat menghasilkan tambahan pendapatan sebesar USD62 miliar
- McKinsey mencatat PDB dapat bertambah hingga USD135 miliar jika partisipasi kerja perempuan naik hingga 56% ditahun 2025



**Lansia perempuan lebih banyak daripada laki-laki** yakni sebesar 52,20%, sementara laki-laki laki 47,80%

Sejak tahun 2021, Indonesia telah memasuki fase struktur penduduk tua (ageing population), di mana sekitar 1 dari 10 penduduk adalah lansia. Fenomena ageing population bisa menjadi bonus demografi kedua, yaitu ketika proporsi lansia semakin banyak tetapi masih produktif dan dapat memberikan sumbangan bagi perekonomian negara.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 1971, Sensus Penduduk 2020, dan Proyeksi Penduduk 2050

# Care Economy dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2045

## TRANSFORMASI INDONESIA

Transformasi  
Sosial

Transformasi  
Ekonomi

Transformasi  
Tata Kelola

Arah Kebijakan

IE3

**Perlindungan Sosial yang Adaptif**

IE1

Kesehatan untuk Semua

IE4

Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Transformasi sosial menuju perlindungan sosial yang adaptif diarahkan untuk meningkatkan **cakupan perlindungan sosial, bansos berdasarkan status kerentanan**, jamsos, dan kesempatan kerja/ berwirausaha kepada seluruh masyarakat baik pada kondisi tanpa bencana/dengan bencana.



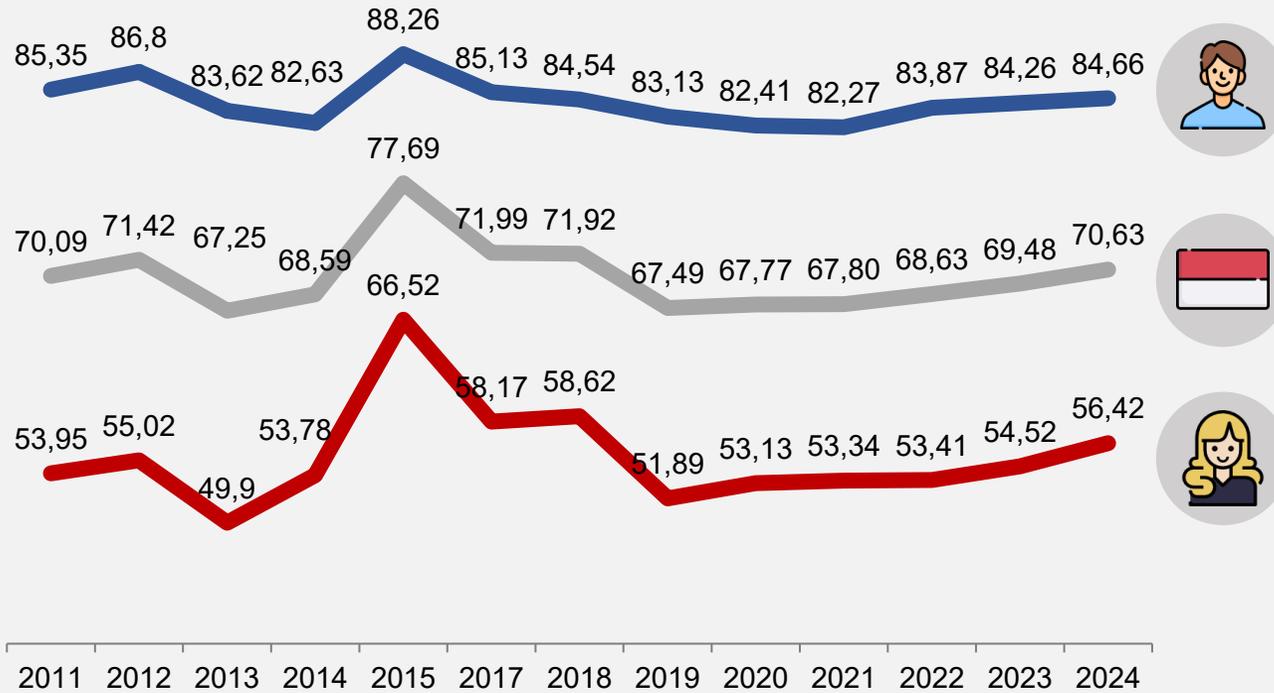
Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja, antara lain melalui penerapan **care economy**, penguatan norma keluarga, pelayanan.

### Aspek Dasar untuk Memperkuat Care Economy:

1. Program Perlindungan Sosial yang mencakup **pekerjaan perawatan (caregiving work)**.
2. Ekosistem dan regulasi yang **inklusif** untuk kelompok penduduk yang membutuhkan perawatan (*caregiving*).
3. Program dan regulasi yang mendukung **peningkatan ketersediaan, produktivitas, penghargaan, dan perlindungan pekerja dan pekerjaan perawatan (care workers dan caregiving work)**.

# POTRET PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DI INDONESIA

## TPAK Indonesia 2011-2024



Sumber: BPS, 2024

**Selama 1 dekade TPAK perempuan konsisten lebih rendah dibanding laki-laki bahkan di bawah TPAK nasional.**

**Perempuan menghabiskan 2.8 kali lebih banyak waktu untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan yang tidak dibayar, sedangkan laki-laki 1.5 kali untuk pekerjaan berbayar**

**Perempuan bekerja dengan jam kerja lebih lama (11.6 jam) dibandingkan laki-laki (9.2 jam) untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan tidak dibayar**

**Peluang partisipasi perempuan dalam angkatan kerja berkurang karena banyaknya jam yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan tidak berbayar**

**Pada saat COVID-19, sebanyak 35% perempuan kehilangan pekerjaan dibandingkan 24% laki-laki,**

**Selama pandemi, intensitas pekerjaan rumah tangga tidak berbayar perempuan meningkat sebesar 19%, sementara laki-laki 11%**

Sumber: ILO, 2022; Rapid Gender Assesments on the socioeconomic impacts of COVID-19 oleh UN Women;

# Urgensi Penyusunan Kebijakan Care Economy

## Mengurangi ketidaksetaraan gender dengan berinvestasi pada perawatan

- **Keterlibatan perempuan** dalam **pekerjaan domestik** lebih tinggi dibanding laki-laki.
- Perempuan menanggung beban terbesar dari pekerjaan **perawatan/pengasuhan tidak berbayar dalam keluarga**, berdampak pada rendahnya partisipasi kerja perempuan.
- TPAK perempuan **56,42%**, jauh dibandingkan dengan TPAK laki-laki (**84,66%**).
- Persentase pekerja formal perempuan lebih rendah daripada laki-laki (**35,37% : 43,97%**).
- Opsi dan ketersediaan fasilitas perawatan dari luar keluarga terbatas.

## Indonesia telah memasuki *Ageing Population*

- Jumlah lansia di Indonesia semakin meningkat, peluang berinvestasi pada *Care* tinggi.
- Jumlah lansia Indonesia mencapai **22,126,321** jiwa (Regsosek, 2022).
- Indonesia telah memasuki ***Ageing Population*** sejak 2021, dimana presentase penduduk lansia mencapai **<10%**.
- Sebanyak **2,7%** lansia dengan indikasi memerlukan perawatan jangka panjang tidak memiliki pemberi rawat (ILAS, 2022).
- Belum adanya program dan jamsos perawatan yang komprehensif untuk lansia.

## Tingkat kemiskinan Penyandang Disabilitas tinggi

- Jumlah Penyandang Disabilitas sedang dan berat di Indonesia mencapai **4,369,766** jiwa (Regsosek, 2022).
- Persentase kemiskinan Penyandang Disabilitas mencapai **13,81%**, jauh di atas kemiskinan nasional (**9,36%**).
- TPAK Penyandang Disabilitas sebesar **44%**.
- Ragam disabilitas mempengaruhi bentuk perawatan yang diberikan.
- Belum adanya program dan jamsos perawatan yang komprehensif untuk penyandang disabilitas.

# Urgensi Penyusunan Kebijakan Care Economy

Pencapaian target 70% TPAK Perempuan di tahun 2045 membutuhkan kenaikan rata-rata 1% per tahun dari TPAK tahun berjalan. Dengan catatan laju pertumbuhan penduduk tetap di kisaran 1% per tahunnya dan tidak ada perempuan yang berhenti bekerja secara besar-besaran.

1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di pekerjaan formal lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki.

2

Tanggung jawab kerja perawatan mayoritas masih dilakukan oleh Perempuan (2/3 dari pekerjaan perawatan dilakukan oleh Perempuan)

3

Untuk merespon kondisi yang tidak setara dalam kerja perawatan dan implikasinya, perlu ada perhatian khusus terhadap pengakuan dan penghargaan terhadap kerja-kerja perawatan.

# Rangkuman Peta Jalan Ekonomi Perawatan 2024-2029

## Recognize

(pengakuan terhadap pekerjaan perawatan)

## Reduce

(pengurangan beban perempuan dalam kerja perawatan, mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender)

## Redistribute

(mendistribusikan kerja perawatan)

## Reward

(memastikan bahwa kerja perawatan dibayar dengan layak)

## Represent

(pekerja perempuan dan pekerja perawatan memiliki suara dalam pembuatan kebijakan)

## 7 Strategi Prioritas:



1

Layanan dan program pengasuhan anak (*daycare*)



2

Layanan dan program pengasuhan lansia (*longterm-care*)



3

Layanan dan program inklusi bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya



4

Pengakuan dan perlindungan pekerja perawatan di berbagai sektor



5

Perlindungan maternitas bagi pekerja perempuan



6

Penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak melalui cuti paternitas



7

Perlindungan dan jaminan sosial dalam ekonomi perawatan

# Existing Policies Related to Care Economy

## UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA)

- **Upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan** dengan memperhatikan pendekatan siklus hidup yang dilakukan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak.
- **Memberi perhatian pada hak ibu dengan kerentanan khusus**

### Mengatur secara komprehensif:

- Hak ibu, termasuk hak ibu yang bekerja, cuti pendampingan suami, dan hak anak
  - Kewajiban ibu dan ayah, keluarga, keluarga pengganti atau lembaga asuhan anak (termasuk ASI dan donor ASI)
  - Tugas dan wewenang penyelenggaraan KIA tanggung jawab: pemerintah pusat dan daerah
- Data dan informasi tidak membentuk sistem baru
- Pendanaan
- Partisipasi masyarakat

## Pedoman Daycare Ramah Anak/ Taman Asuh Ceria (TARA)

- Penguatan dan pengembangan layanan Taman Asuh Ceria (TARA)/Daycare Ramah Anak; peningkatan kapasitas layanan TARA/Daycare Ramah Anak sesuai standard; dan peningkatan layanan TARA/Daycare Ramah Anak sesuai persyaratan standard yang digunakan untuk keperluan audit atau penilaian kesesuaian (conformity assesment) dalam rangka sertifikasi

## Daycare Ramah Anak pada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

- Penyediaan tempat penitipan anak yang ramah anak di desa dapat menjadi program unggulan yang dapat memberikan layanan pengasuhan alternatif bagi keluarga. Tempat penitipan anak harus terstandarisasi dan memenuhi kebutuhan anak sekaligus mendukung partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja jangka panjang.



# Existing Policies Related to Care Economy

## Pilot Project Penempatan Pekerja Perempuan di Sektor Perawatan (Profesional - Berbayar)

KemenPPPA dan K/L terkait sedang mengembangkan 2 (dua) pilot project pada sektor perawatan:

- 1) Program modeling kebijakan *decent care works* atau pengakuan pekerja perawatan yang mencakup pendidikan dan penyaluran kerja care workers ke Singapura
- 2) Program modeling kebijakan *childcare, elderly care dan inclusive care* dengan melibatkan private sector, mencakup:
  - Pengembangan modul/kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
  - Meningkatkan jumlah pekerja penyandang disabilitas dan infrastruktur inklusif.

## Launching Care Economy Working Group (Kolaborasi dengan ILO)

Pokja Care Economy akan ditetapkan melalui Permenko PMK, yang bertujuan untuk:

- Memperkuat sinergi lintas K/L dalam implementasi kebijakan *care economy* melalui tujuh agenda prioritas yang bersifat lintas sektor, yang perlu dijalankan secara kolaboratif, terpadu, dan terarah.
- Menjadi forum koordinatif untuk memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peta Jalan *Care Economy*, termasuk identifikasi tantangan dan penyusunan solusi yang tepat.

# Desain Pelaksanaan Care Economy 2025-2029

## Fondasi Awal Care Economy

Membuat Pilot Project dengan:

- Memberikan layanan caregiver untuk Lanjut Usia, Disabilitas, Anak
- Peningkatan kapasitas kelompok rentan sebagai caregiver

2025

### Kegiatan

- ◆ Pelatihan Dasar Caregiver
- ◆ Menyusun mekanisme monitoring

## Perluasan dan Penguatan Kapasitas

- Perluasan jangkauan layanan caregiver
- Peningkatan kualitas pelatihan dan penjajagan untuk sertifikasi
- Penyusunan standar nasional dan regulasi

2026

### Kegiatan

- ◆ Standarisasi Caregiver untuk kelompok rentan
- ◆ Kerjasama dengan Sektor Swasta dan Institusi Pendidikan

## Penguatan Sistem dan Regulasi

- Pengesahan regulasi pelaksanaan secara makro
- Implementasi kebijakan dan regulasi

2027

### Kegiatan

- ◆ Pengesahan Peraturan Care Economy
- ◆ Penetapan Sistem Monitoring dan Evaluasi

## Penyempurnaan dan Inovasi

- Meningkatkan skala dan cakupan layanan nasional
- Mendorong inovasi dalam layanan dan pelatihan caregiver
- Kolaborasi Internasional

2028

### Kegiatan

- ◆ Pengembangan Layanan Caregiver secara Nasional;
- ◆ Riset Pengembangan Metode Layanan Caregiver

## Konsolidasi dan Penguatan Ekosistem

- Mengkonsolidasikan program menjadi ekosistem care economy yang kuat
- Mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat

2029

### Kegiatan

- ◆ Integrasi Sistem dan Proses Layanan
- ◆ Pengembangan layanan dan inovasi Care Economy

# Tantangan Pengakuan dan Perlindungan Pekerja Perawatan

Tidak semua jenis pekerja perawatan diakui sebagai pekerja

Kurangnya data yang komprehensif terkait jumlah dan profil pekerja perawatan di Indonesia

Upah pekerja perawatan yang tidak layak

Belum adanya serikat pekerja perawatan

Minimnya perlindungan bagi pekerja perawatan khusus di sektor rumahan/individual (termasuk dari kekerasan/pelecehan dan eksploitasi)

Minimnya jaminan sosial yang tersedia bagi pekerja perawatan

Minimnya pelatihan bagi pekerja perawatan



“Sudah adilkah rumah kita?” merupakan refleksi penting. Rumah adalah fondasi dari masyarakat. Jika rumah tangga kita belum adil, bagaimana mungkin kita bisa membangun bangsa yang adil dan setara?

Kita dapat memulai perubahan dari rumah kita masing-masing, sambil mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dan kesejahteraan bersama.

Dengan kolaborasi, komitmen, dan keberanian, Indonesia akan mampu mewujudkan ekonomi perawatan yang inklusif, adil, dan berdaya saing.



**PEREMPUAN BERDAYA  
ANAK TERLINDUNGI  
MENUJU  
INDONESIA EMAS 2045**  
Terima Kasih